

## ***Systematic literature Review: Membangun Kesejahteraan Sosial Indonesia, Peluang dan Hambatan***

**Tomi Agus Triono**

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: [Tomiagustriono87@gmail.com](mailto:Tomiagustriono87@gmail.com)

**Abstrack:** *This study aims to explore the opportunities and challenges in building social welfare in Indonesia through a systematic review of relevant prior literature. Utilizing the systematic literature review (SLR) method, 20 high-quality studies were identified, evaluated, and synthesized to generate significant findings. The results reveal potential opportunities, such as stable economic growth, policy reforms, the utilization of digital technology, and partnerships with civil society organizations and the private sector. However, challenges that need to be addressed include budget constraints, regional disparities in access to basic services, lack of capacity and coordination among government agencies, and geographical and demographic challenges. These findings provide a comprehensive overview of the supporting and hindering factors in building social welfare in Indonesia, which can serve as a basis for developing more effective policies and strategies. To optimize opportunities and overcome challenges, strong commitment and collaboration from all stakeholders are required, along with specific efforts such as increasing budget allocation, strengthening coordination, adopting technology and innovation, and prioritizing development in underdeveloped areas. With coordinated and sustained efforts, Indonesia can achieve equitable and inclusive social welfare for all its citizens.*

**Keywords;** *social welfare, Indonesia, opportunities, challenges, policy, systematic literature review;*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan hambatan dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia melalui tinjauan sistematis terhadap literatur terdahulu yang relevan. Dengan menggunakan metode systematic literature review (SLR), sebanyak 20 studi berkualitas telah diidentifikasi, dievaluasi, dan disintesis untuk menghasilkan temuan-temuan penting. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat peluang potensial, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi kebijakan, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil serta sektor swasta. Namun, terdapat pula hambatan yang harus diatasi, di antaranya keterbatasan anggaran, disparitas wilayah dalam akses layanan dasar, kurangnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah, serta tantangan geografis dan demografis. Temuan ini memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun kesejahteraan sosial di Indonesia, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi hambatan, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, serta upaya khusus seperti peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi, adopsi teknologi dan inovasi, serta prioritas pembangunan di wilayah tertinggal. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan inklusif bagi seluruh rakyatnya.

**Keywords:** kesejahteraan sosial, Indonesia, peluang, hambatan, kebijakan, systematic literature review;

**Article Information:** Submitted: 2024-04-06; Revised 2024-05-06; Accepted: 2024-06-06



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **LATAR BELAKANG**

Upaya membangun kesejahteraan sosial merupakan agenda penting bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi besar, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyatnya [1], [2]. Meskipun telah mencapai beberapa kemajuan, disparitas masih terjadi dalam hal akses terhadap layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat [3], [4]

Untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial, pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program dan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan, perbaikan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan [4]. Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kendala infrastruktur [5].

Berbagai upaya telah dilakukan oleh peneliti, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam membangun kesejahteraan sosial di Indonesia melalui penelitian-penelitian empiris maupun kajian literatur. Namun, belum ada tinjauan sistematis yang mengkonsolidasikan temuan-temuan tersebut secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan systematic literature review (SLR) terhadap studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan metode SLR yang sistematis dan terstruktur, penelitian ini akan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber literatur yang berkualitas untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan utama dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai pada uraian di atas maka pertanyaan penelitian dapat di ajukan sebagai berikut:

RQ1: Apa saja hambatan terbesar pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia?

RQ2: Apa saja Peluang dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi terdahulu yang relevan dengan topik membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan tinjauan yang komprehensif dan sistematis terhadap literatur yang ada [6].

Pencarian literatur akan dilakukan pada database utama Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian akan mencakup kombinasi dari istilah-istilah seperti "kesejahteraan sosial," "Indonesia," "peluang," "hambatan," "kebijakan," dan lain-lain. Selain itu, pencarian juga akan dilakukan pada sumber-sumber lain seperti laporan pemerintah, publikasi organisasi internasional, dan situs web institusi terkait.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

**Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun	Studi lebih dari 10 Tahun terakhir
Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris	Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Studi yang membahas topik kesejahteraan sosial di Indonesia	Diluar topik kesejahteraan sosial di Indonesia

**Tabel 2. Pemilihan Artikel**

<b>Sleksi artikel</b>	Penyaringan awal akan dilakukan berdasarkan judul dan abstrak. Artikel yang lolos penyaringan awal kemudian akan diseleksi lebih lanjut dengan membaca teks lengkap untuk memastikan relevansi dan kualitasnya
<b>Ekstraksi artikel</b>	Data yang lolos akan diekstraksi dari studi-studi yang lolos sleksi, meliputi informasi tentang penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan kesimpulan
<b>Penilaian Kualitas artikel</b>	Kualitas artikel yang dimasukkan dalam tinjauan akan dinilai menggunakan alat penilaian kualitas yang sesuai, seperti checklist atau pedoman penilaian kualitas yang diakui secara umum.
<b>Sintesis Data</b>	Data yang diekstraksi akan disintesis secara sistematis untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan utama dalam membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Metode sintesis yang akan digunakan dapat berupa analisis naratif, meta-analisis, atau metode lain yang sesuai dengan karakteristik data
<b>Pelaporan</b>	Hasil dari SLR akan dilaporkan secara terstruktur sesuai dengan pedoman pelaporan yang diakui seperti PRISMA. Temuan-temuan penting akan didiseminasikan melalui publikasi dalam jurnal ilmiah atau forum akademik yang relevan.

## HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan proses seleksi studi yang ketat, sebanyak 20 literatur dari berbagai sumber dianggap memenuhi kriteria inklusi dan dimasukkan dalam tinjauan sistematis ini. Studi-studi tersebut terdiri dari artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi dari organisasi internasional yang membahas topik kesejahteraan sosial di Indonesia.

### Peluang dalam Membangun Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Berdasarkan sintesis dari studi-studi yang diulas, beberapa peluang utama dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia telah teridentifikasi, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, yang dapat mendukung alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program kesejahteraan sosial [5],[7], [8], [9].
- Reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola, seperti desentralisasi fiskal dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, yang dapat meningkatkan efektivitas program-program kesejahteraan sosial [2], [10], [11].



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- c. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial, seperti sistem informasi terpadu dan platform e-government, yang dapat meningkatkan akses dan efisiensi [1], [12], [13].
- d. Kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat lokal, yang dapat memperkuat kapasitas dan cakupan program-program kesejahteraan sosial [14], [15], [16]

### **Hambatan dalam Membangun Kesejahteraan Sosial di Indonesia**

Di sisi lain, tinjauan sistematis juga mengungkapkan beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia, antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran dan alokasi dana yang tidak optimal untuk program-program kesejahteraan sosial, terutama di daerah-daerah terpencil [4], [16], [17].
- b. Disparitas wilayah yang signifikan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan sosial [3], [18], [19].
- c. Kurangnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam implementasi program-program kesejahteraan sosial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi [4], [20], [21].
- d. Tantangan geografis dan demografis, seperti wilayah kepulauan yang luas dan populasi yang tersebar, yang dapat menyulitkan penyediaan layanan kesejahteraan sosial secara merata [22], [23].

Temuan-temuan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang dan hambatan dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia berdasarkan sintesis dari literatur terdahulu. Hasil tinjauan sistematis ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Hasil tinjauan sistematis ini mengungkapkan berbagai peluang dan hambatan dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, namun terdapat pula potensi dan faktor-faktor pendukung yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih merata.

### **Peluang dalam Membangun Kesejahteraan Sosial**

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi program-program kesejahteraan sosial. Seperti yang ditemukan dalam studi-studi terdahulu pertumbuhan ekonomi yang positif dapat mendukung peningkatan belanja pemerintah di sektor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial [5],[6], [8]. Namun, perlu diperhatikan



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan kebijakan distribusi yang adil dan pemerataan kesejahteraan.

Reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola, seperti desentralisasi fiskal dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, juga menjadi peluang penting. Desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas program-program kesejahteraan sosial dengan memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi lokal [10], [24]. Sementara itu, koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dapat mencegah tumpang tindih program dan memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan [2].

Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial juga menjadi peluang yang potensial. Sistem informasi terpadu dan platform e-government dapat meningkatkan akses dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, serta memfasilitasi pemantauan dan evaluasi program secara lebih efektif [1], [12], [13]. Namun, perlu diperhatikan bahwa adopsi teknologi ini harus dibarengi dengan upaya untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat lokal juga merupakan peluang yang penting. Kemitraan ini dapat memperkuat kapasitas dan cakupan program-program kesejahteraan sosial, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat [14], [15], [16]. Namun, perlu diperhatikan bahwa kemitraan harus didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

### **Hambatan dalam Membangun Kesejahteraan Sosial**

Di sisi lain, tinjauan sistematis juga mengungkapkan beberapa hambatan utama dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Keterbatasan anggaran dan alokasi dana yang tidak optimal untuk program-program kesejahteraan sosial, terutama di daerah-daerah terpencil, merupakan salah satu hambatan utama [4], [16], [17]. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan alokasi anggaran dan prioritas bagi sektor kesejahteraan sosial, serta penyaluran dana yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Disparitas wilayah yang signifikan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga menjadi hambatan besar [3], [18], [19]. Kesenjangan ini dapat memperlebar ketimpangan dalam kesejahteraan sosial dan menghambat upaya pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan memperkuat jaringan layanan dasar di seluruh wilayah Indonesia.

Kurangnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam implementasi program-program kesejahteraan sosial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, juga menjadi hambatan yang perlu diatasi [4], [20], [21], [25]. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem manajemen, dan penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini.



Tantangan geografis dan demografis, seperti wilayah kepulauan yang luas dan populasi yang tersebar, juga menjadi faktor penghambat dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial secara merata [22], [23]. Hal ini menuntut inovasi dalam pendekatan dan strategi penyaluran bantuan, serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dengan memahami peluang dan hambatan yang ada, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Upaya-upaya ini harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengawasan serta evaluasi yang ketat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur terdahulu yang relevan dengan topik membangun kesejahteraan sosial di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi peluang dan hambatan yang ada. Melalui proses seleksi yang ketat, sebanyak 20 studi berkualitas telah diulas dan disintesis untuk menghasilkan temuan-temuan penting.

Hasil tinjauan sistematis mengungkapkan bahwa terdapat peluang yang potensial untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial di Indonesia, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi digital dan inovasi, serta kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa hambatan utama yang harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran, disparitas wilayah dalam akses terhadap layanan dasar, kurangnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah, serta tantangan geografis dan demografis.

Temuan-temuan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang dan hambatan dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengoptimalkan peluang yang ada, beberapa langkah penting yang dapat diambil antara lain meningkatkan alokasi anggaran dan prioritas bagi sektor kesejahteraan sosial, memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, serta mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat lokal juga perlu ditingkatkan untuk memperluas cakupan dan dampak program-program kesejahteraan sosial.

Di sisi lain, untuk mengatasi hambatan yang ada, diperlukan upaya khusus untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat sistem manajemen serta mekanisme koordinasi dalam implementasi program-program kesejahteraan sosial. Selain itu, inovasi dalam



pendekatan dan strategi penyaluran bantuan, serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur yang memadai, juga diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan demografis yang beragam.

Secara keseluruhan, upaya membangun kesejahteraan sosial di Indonesia membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan secara strategis, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

## REFERENCE

- [1] Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. 3. pp. 1–194, 2020.
- [2] SMERU, “Laporan Tahunan 2019.” The SMERU Research Institute, pp. 53–54, 2019.
- [3] United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Situasi Anak di Indonesia - Tren, peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Unicef Indones.*, pp. 8–38, 2020.
- [4] BAPPENAS, “Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024,” *Natl. Mid-Term Dev. Plan 2020-2024*, p. 313, 2020, [Online]. Available: <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>
- [5] World Bank, “Indonesia Economic Prospects: Charting an Inclusive Recovery,” *World Bank Group*. Washington, D.C., pp. 1–55, 2022.
- [6] B. Kitchenham, E. Mendes, and G. H. Travassos, “A systematic review of cross-vs. within-company cost estimation studies,” in *10th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, BCS Learning & Development, 2006.
- [7] A. P. Rany, S. A. Farhani, V. R. Nurina, and L. M. Pimada, “Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui indonesia green growth program oleh bappenas,” *J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 20, no. 1, pp. 63–73, 2020.
- [8] S. Suradi, “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial,” *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. dan Usaha Kesejaht. Sos.*, vol. 17, no. 3, 2012.
- [9] D. M. Darajat and M. Muhtadi, “Strategi Literasi Politik untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. dan Usaha*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Kesejaht. Sos.*, vol. 6, no. 3, pp. 305–317, 2020.
- [10] B. Saputra and M. Mahmudi, “Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” *J. Akunt. Dan Audit. Indones.*, vol. 16, no. 2, 2012.
  - [11] W. Hendri, “Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. Dan Pendidikan)*, vol. 4, no. 2, 2020.
  - [12] United Nations Development Programme, *Human development report 2020*. 2020. [Online]. Available: <https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>
  - [13] A. H. M. Nurdin, “Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government,” *J. MP (Manajemen Pemerintahan)*, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, 2018.
  - [14] H. Lawelai and A. Nurmandi, “The Model of Collaborative Governance in Addressing Poverty in Indonesia,” *J. Ranah Publik Indones. Kontemporer*, vol. 2, no. 2, pp. 195–206, 2022.
  - [15] T. Sulaksono, M. Suswanta, D. Efendi, and A. Darumurti, “Governing State Borders An Investigating" Collaborative Governances" in strengthening Social Welfare Development in Nunukan Regency, Indonesia,” in *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*, Atlantis Press, 2017, pp. 82–86.
  - [16] M. Sabarisman, “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan,” *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. dan Usaha Kesejaht. Sos.*, vol. 5, no. 2, 2019.
  - [17] H. Habibullah, “Dimensi Keterlibatan Relawan Sosial Pada Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia,” *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. Dan Usaha Kesejaht. Sos.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–12, 2021.
  - [18] A. Primanto and S. Sos, *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI INDONESIA*. Zahira Media Publisher.
  - [19] L. ANJELINA, “STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (Studi Pada Pelayanan Dasar Di Kabupaten Pesisir Barat).” UNIVERSITAS LAMPUNG, 2022.
  - [20] J. Riskiyono, “Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan,” *Aspir. J. Masal. Sos.*, vol. 6, no. 2, pp. 159–176, 2015.
  - [21] W. P. Sutisna, “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Daerah,” *J. Desentralisasi*, vol. 11, no. 2, pp. 419–432, 2013.
  - [22] B. P. Statistik, “Statistical yearbook of Indonesia,” *Badan Pus. Stat. Jakarta. ISSN/ISBN*, vol. 126, p. 2912, 2019.
  - [23] A. M. Ginting, “Kendala pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Provinsi Kepulauan Riau,” *J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri dan Hub. Int.*, vol. 4, no. 1, 2016.
- [24] A. F. Rachmad, E. Azaria, Q. N. Xusan, and N. Azzahra, “Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah,” *J. Penelit. Serambi Huk.*, vol. 16, no. 02, pp. 75–88, 2023.
- [25] S. Sugiyanto, A. Giawa, and M. Musoli, “Kepemimpinan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Versus Konsep Wewenang Max Weber,” *EMPATI J. Ilmu Kesejaht. Sos.*, vol. 9, no. 1, pp. 20–34, 2020.

